



Kemitraan antara Proyek Tangguh Dengan Kepolisian Papua Periode 2006

Program Pengamanan Terpadu Berbasis Masyarakat (ICBS) dibentuk dengan tujuan untuk memberikan rasa aman bagi orang-orang yang bekerja dan bermukim di proyek Tangguh dan sekitarnya. Program ini dikembangkan bersama-sama pemerintah Indonesia untuk menjawab kekhawatiran para pemegang saham tentang masalah keamanan dan hak asasi manusia yang didasari pada kemitraan antara proyek Tangguh, masyarakat setempat dan petugas keamanan dari pemerintah. Pada tanggal 16 April 2004, Polda Papua dan BP, sebagai operator proyek Tangguh, menandatangani Petunjuk Lapangan Pengamanan Bersama (Juklap-Pambers) . Juklap ini dibuat sebagai tindak lanjut dari MoU yang telah dibuat sebelumnya antara BP Migas dengan pihak Kepolisian, pada tanggal 22 Agustus 2003.

Petunjuk lapangan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, tertib dan tanpa ada pelanggaran hukum di dalam proyek Tangguh. Juklap ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan pengamanan dalam lingkungan proyek dan sekitarnya. Juklap ini menegaskan bahwa BP bertanggung jawab atas keamanan proyek dengan mempekerjakan petugas keamanan tidak bersenjata. Selain itu, Juklap ini juga secara spesifik menyebutkan prosedur yang harus dilakukan bilamana BP meminta bantuan kepada polisi, serta prosedur yang harus dipenuhi pihak kepolisian dalam memberikan bantuan tersebut.

Petunjuk lapangan ini juga menjelaskan secara spesifik/khusus mengenai komitmen dari kedua belah pihak—BP dan kepolisian—dalam hal pertanggungjawaban biaya yang harus dibayarkan untuk melakukan pengamanan proyek Tangguh, dengan rincian sebagai berikut:

- Masing-masing organisasi akan menanggung biayanya sendiri dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari kewajiban utama masing-masing, diluar dari yang disebutkan dalam petunjuk lapangan.
- Semua biaya, pembayaran dan penggunaan material atau pengadaan akan dilaporkan secara terbuka dan transparan, serta masing-masing pihak berhak untuk memberikan informasi tersebut kepada publik.
- Jika BP meminta bantuan keamanan dari polisi, maka:
 - Dengan persetujuan BP serta permohonan pembayaran, BP Migas akan melakukan pembayaran untuk transportasi, akomodasi, makan dan uang saku.
 - Jumlah pembayaran yang dilakukan serta prosedur pembayarannya akan mengikuti aturan yang telah dikeluarkan oleh BP Migas.
 - BP akan dibebaskan dari kewajiban untuk membayar hal-hal diluuardari persetujuan bersama BP Migas (*cost recoverable*), berdasarkan asas yang berlaku dalam Kontraktor Kontrak Kerja Sama, serta dengan persetujuan dari manajemen BP dan para mitra dalam proyek Tangguh.



- BP tidak akan mengizinkan dan tidak akan memberikan senjata, atau persenjataan, amunisi atau dana untuk membantu pengadaan barang-barang tersebut.

Untuk keterangan lebih lanjut tentang Program Pengamanan Berbasis Masyarakat (ICBS) ini, serta salinan Juklap, dapat dilihat dalam situs, www.bp.com/tanggung.

Pembayaran yang dilakukan periode 2006 dalam bentuk bantuan langsung untuk pengamanan Tangguh

Penjelasan mengenai pembayaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. Catatan: bantuan ini tidak mencerminkan bantuan lain yang diberikan seperti pelatihan oleh organisasi hak asasi manusia berkaitan dengan pembentukan forum desa dan penegakan hukum di daerah Teluk Bintuni, yang didukung oleh Program Sosial Terpadu dari Tangguh melalui Program Pengamanan Berbasis Masyarakat (ICBS). (Untuk keterangan lebih lanjut dapat diakses di www.bp.com/Tanggung). Pembayaran ini juga tidak mencerminkan pelatihan yang diberikan kepada polisi seperti yang diwajibkan oleh peraturan yang ada sebagai bagian dari sertifikasi petugas pengamanan professional.

Pembayaran pada tahun 2006 untuk dukungan langsung terhadap pengamanan Tangguh LNG

Pada tahun 2006, tidak banyak kegiatan yang memerlukan biaya dari BP berkaitan dengan kerjasama dengan pihak kepolisian. Hanya ada satu kegiatan yang dibiayai oleh BP melalui Kepolisian Daerah Papua adalah sosialisasi Petunjuk Lapangan Pengamanan Bersama (JUKLAP) di beberapa daerah di Papua, termasuk di Jayapura bertempat di kantor kepolisian Papua (POLDA), Manokwari bertempat di kantor kepolisian resort (POLRES), Bintuni berlokasi di kantor POLRES, Fakfak di kantor POLRES serta di kantor POLSEK Babo.

Latar belakang kegiatan

Setelah penandatanganan JUKLAP pada April 2004, sebagai tindak lanjut perlu dilakukan sosialisasi JUKLAP kepada semua pihak yang terkait, seperti kepada aparat penegakan hukum (polisi), pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Secara teknis pelaksanaan JUKLAP terbagi pada beberapa daerah di Papua dan Irian Jaya Barat. Pembagian tersebut dilakukan untuk mengakomodasi lokasi pihak-pihak terkait yang memang menyebar dari Jayapura (kantor pusat kepolisian) ke Manokwari (Pemerintahan Irian Jaya Barat, POLRES, perwakilan adat dan masyarakat), Bintuni (pemerintah setempat/Bupati, POLRES, perwakilan adat dan masyarakat setempat), Babo dan Fakfak.

Tujuan dari sosialisasi JUKLAP adalah untuk membangun pemahaman yang lengkap tentang pelaksanaan dari petunjuk lapangan ini kepada semua pihak terkait. JUKLAP secara jelas mengatur prosedur serta syarat-syarat untuk permintaan bantuan pengamanan kepada polisi, pembagian tugas antara petugas pengamanan dari BP dan aparat setempat di dalam setiap tingkatan kondisi keamanan, seperti normal,



darurat dan berbahaya, dan yang juga penting adalah JUKLAP mengatur mengenai biaya biaya yang mungkin dikeluarkan oleh BP apabila bantuan keamanan di perlukan.

Tanggal	Jumlah	Keterangan
27 Juni 2006		